KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TANAH KUNING DALAM MENINGKATKAN PARIWISATA DI DESA TANAH KUNING KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN

PROPOSAL PENELITIAN

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara Tanjung Selor

Oleh :

Amsar
NPM : 201751011

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2022

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TANAH KUNING DALAM MENINGKATKAN PARIWISATA DI DESA TANAH KUNING KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN

PROPOSAL PENELITIAN

Oleh :

Amsar
NPM : 201751011

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2022

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TANAH KUNING DALAM MENINGKATKAN PARIWISATA DI DESA TANAH KUNING KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN

Oleh :

Amsar

NPM : 201851022

Telah di setujui oleh Dosen Pembimbing:

Dosen Pembimbing :

IRSYAD SUDIRMAN, S.IP, MA

NIDN. 11.251182.01

Mengetahui:

Dekan,

IRSYAD SUDIRMAN, S.IP, MA

NIDN. 11.251182.01

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Dasar Teori 6
1. Kebijakan (Policy) 6
2. Pemerintah Desa 8
3. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata 11
4. Pariwisata 12
5. Pembangunan Pariwisata Desa 15
B. Penelitian Terdahulu 18
C. Alur Pikir 21
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian 22
B. Jenis Penelitian 23
C. Fokus Penelitian 23
D. Pemilihan Informan 24
E. Teknik Pengumpulan Data 26
F. Teknik Analisis Data 29
G. Keabsahan Data 30

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di berbagai lapisan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, Sehingga dalam penanganannya harus dilakukan dengan serius dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, selain itu untuk mencapai semua tujuan pengelolaan pariwisata, harus diadakan promosi agar potensi dan daya tarik wisata dapat lebih dikenal dan mampu menggerakkan calon wisatawan untuk mengunjungi dan menikmati tempat wisata. Dalam hal ini industri pariwisata yang lebih bervariasi menyangkut pelestarian dari objek itu sendiri sesuai dengan tujuan pengelolaan pariwsata yaitu untuk mengenalkan keindahan alam, budaya dan adat istiadat yang beranekaragam.

Kegiatan wisata secara langsung maupun tidak langsung mengarahkan wisatawan untuk menghargai dan mencintai alam serta budaya lokal, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian para wisatawan untuk turut memelihara kelesatarian alam. Agar objek wisata tetap lesatari perlu adanya pengelolaan dengan melibatkan *stakeholders* terkait seperti pemerintah, masyarakat, swasta. Pengembangan ekowisata selain sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan juga diharapkan dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat lokal.

Kawasan pariwisata dapat mudah dijumpai oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa peminat akan pariwisata terus bertambah setiap harinya. Semakin banyak minat dari masyarakat mendorong pelaku usaha untuk berlomba-lomba membangun kawasan pariwisata dan terus mengembangkan wahana dan infrastruktur yang terdapat di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan pelaku usaha untuk menarik minat dari pengunjung yang akan menggunakan objek pariwisata.

Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembanganya tetap pada jalurnya dan daya dukungannya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah yang bersangkutan, pariwisata dapat memacu pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut. Membicarakan tentang pengembangan objek wisata tidak terlepas dari peranan pemerintah khususnya dinas pariwisata serta pemerintah Desa. Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Penerapan semua peraturan pemerintah dan undang–undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial.

Salah satu sektor pembangunan yang hampir tidak terpengaruh oleh sistem kuota atau resesi ekonomi adalah sektor jasa yang didalamnya termasuk jasa pariwisata. Di masa yang akan datang diperkirakan pariwisata akan cederung meningkat. Kabupaten Bulungan, merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara memiliki banyak potensi wilayah yang bisa dikembangkan menjadi obyek-obyek parisiwata yang selama ini terbengkalai tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bulungan terletak di Kalimantan Utara. Kabupaten Bulungan memiliki 10 kecamatan yang ada di dalamnya, dan 81 kelurahan, Ibu kota Kabupaten Bulungan adalah Tanjung Selor. Dengan banyaknya kecamatan dan kelurahan yang ada di dalamnya tentu terdapat pula banyak tempat wisata alam di Bulungan.

Salah satu objek wisata yang sangat sering dikunjungi masyarkat yang ada di Kabupaten Bulungan ataupun dari Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, bahkan ada dari Provinsi lainnya, termasuk dari mancanegara adalah wisata pantai yang berada di Desa Tanah Kuning kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Wisata Pantai Desa Tanah Kuning sangat terkenal dan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik pada nuansa laut. Oleh karena itu, daya tarik wisata Pantai Tanah Kuning perlu dikembangkan sehingga wisatawan mendapatkan kepuasan. Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan wisata di Desa Tanah Kuning, Pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah desa harus beperan penting untuk membuat ebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan wisata tersebut, sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan dari potensi wisata.

Pada dasarnya pengembangan Wisata Pantai Desa Tanah Kuning sangat penting untuk dilakukan. Pengembangan pariwisata di Desa Tanah Kuning akan memberikan perubahan dan keberlangsungan baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat lokal dan pemerintah, namun berbagai kendala yang harus dihadapi Pemerintah Desa Tanah Kuning dalam pengembangan adalah jalan menuju ke pantai Desa Tanah Kuning masih kurang baik, selain itu fasilitas atau sarana olahraga pantai masih terbatas.

Pada umumnya pengembangan kawasan pariwisata tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana di dalam obyek wisata tersebut. Hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kawasan wisata karena ketersediaan sarana dan prasarana diperlukan guna menunjang kepuasan wisatawan serta dapat meningkatkan pendapatan daerah setempat dimana kawasan wisata tersebut berada. oleh karena itu, peran Pemerintah Desa Tanah Kuning terhadap pengembangan kawasan Wisata sangat strategi sebagai perencana, pelaksanan dan evaluasi, karena Pemerintah Desa Tanah Kuning yang bertanggung jawab penuh terhadap segala urusan kebudayaan dan kepariwisataan di Desa Tanah Kuning. Pemerintah Desa Tanah Kuning harus mampu merancang dan merumuskan kebijakan yang berorientasi kepada pengembangan wisata .

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kebijakan pemerintah desa Tanah Kuning dalam meningkatkan pariwisa di desa Tanah Kuning kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan”

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian yautu : bagaimana kebijakan pemerintah desa Tanah Kuning dalam meningkatkan pariwisata di desa Tanah Kuning kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah desa Tanah Kuning dalam meningkatkan pariwisata di desa Tanah Kuning kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.

D. Manfaat Penelitian

Sugiyono (2011)**,** menjelaskan bahwa manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan dalam topik penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah desa Tanah Kuning dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti berikutnya .
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu terkait dengan evaluasi kebijakan dalam peningkatan wisata.
4. Manfaat praktis yaitu menambah, memperdalam dan mengembangkan pegetahuan penulis dalam mengambil kebijakan dalam peningkatan wisata desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan (*Policy*)

Di dalam kamus politik yang ditulis oleh Marbun (2007) dikatakan bahwa: "Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejaheraan masyarakat. Kebijakan setidaknya memenuhi empat hal yakni;

1) Tingkat hidup masyarakat meningkat,
2) Terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual,
3) Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan
4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan (Noeng Muhadjir, 2000: 15).

Kemudian Monahan dan Hengst dalam (Heinz Weihrich, 1993: 123) bahwa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (city). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untukmengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Sementara menurut Weihrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna (2008 : 15) bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetatp dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan mereflesikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.3 Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai peryataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer. Sementara Koontz, Donnell dan Weihrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebutdiambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam memutuskan komitmen. (Haroid KoontzCyrill O'Donell, 1992 : 144).

Lauddin Marsuni (2006) mengutip pengertian kebijakan negara yang dikemukakan oleh Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan sebagai a projected program of goals, values and practices. Juga sebagai sebuah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

2. Pemerintahan Desa

Konsep pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, desa memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya. Di dalam tiap daerah kaupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Pemerintahan Desa. Nurcholis (2011:75) menyatakan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selanjutnya Jamaludin (2015:110) menyatakan bahwa, pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa.

Menurut Nurcholis (2011: 75) pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa.
b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
    1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
    2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan trknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain,
    3) Unsur kewilayahan, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Jika Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah, maka berbeda dengan BPD yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun fungsi pemerintah desa menurut Rivai (dalam Jamaludin 2015:111), merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial kelompok masyarakat. Secara operasional fungsi tersebut dapat dibedakan dalam fungsi pokok sebagai berikut :

1. Intruktif. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana,

dan dimana pemerintahan dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Konsultatif. Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin memerlukan konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinnya.
3. Partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Partisipasi ini tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.
4. Delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.
5. Pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam. Koordinasi yang efektif, memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin yang dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

Berdasarkan pengertian tentang peran dan pemerintahan desa tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan peran pemerintah desa adalah segala urusan yang dapat dilakukan oleh kepala desa beserta perangkat desa yang

membantu dalam menjalankan fungsi, tanggungjawab, dan kewajibannya menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang diperoleh dari kewenangan desa. Oleh karena itu peran pemerintah desa sangat penting terutama dalam meningkatkan serta mendukung pengelolaan dan pengembangan potensi desa yang dimiliki sehingga dapat mendorong jalannya pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata

Dari hak dan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Desa mempunyai peran dalam pengembangan desa wisata. Menurut Blakely (dalam Kuncoro 2004:113-114), peran-peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Wirausaha

Sebagai wirausaha Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah Desa dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh Pemerintah Desa untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan- tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.

b. Koordinator

Pemerintah Desa dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya.

Perencanaan pengembangan wisata atau perencanaan pengembangan ekonomi yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.

c. Fasilitator

Pemerintah Desa dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

d. Stimulator

Pemerintah Desa dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha. Dalam bidang kepariwisataan Pemerintah Desa juga dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu.

4. Pariwisata

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Suwantoro (1997:3) menyatakan bahwa, pariwisata adalah suatu kegiatan bepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah

karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Selanjutnya Yoeti (dalam Suryadana dan Octavia 2015:30) menyatakan bahwa, istilah pariwisata sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki persamaan makna dengan tour, yang berarti berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain.

Wardiyanta (2006:49-50) menyatakan bahwa pariwisata memiliki dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek substansial. Dari sisi kelembagaannya, pariwisata merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan rekreatifnya. Sedangkan sebagai sebuah substansi, pariwisata merupakan bagian dari budaya masyarakat, yaitu berkaitan dengan cara penggunaan waktu senggang yang dimiliki.

Pariwisata tentu tidak akan terlepas dari pelaku pariwisata. Damanik dan Weber (2006: 19) menyebutkan beberapa pelaku pariwisata sebagai berikut :

a. Wisatawan

   Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka berdampak langsung pada kebutuhan wisata, yang dalam hal ini permintaan wisata.

b. Industri Pariwisata Indsutri pariwisata adalah semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata. Mereka dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu:

   1. Pelaku langsung, yaitu usaha-usaha yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan.

2. Pelaku tidak langsung, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata misalnya kerjainan tangan, panduan wisata, dsb.

c. Pendukung Jasa Wisata

Kelompok ini adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada wisatawan sebagai penggguna jasa dan produk ini.

d. Pemerintah

Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Pemerintah juga bertanggungjawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata.

e. Masyarakat Lokal

Penduduk asli yang bermukin di kawasan wisata menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata, karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata.

f. Lembaga Swadaya Masyarakat

Banyak LSM, baik lokal, regional, maupun internasional yang melakukan kegiatan di kawasan wisata. bahkan jauh sebelum pariwisata berkembang, organisasi non pemerintah ini sudah melakukan aktvitasnya baik secara partikuler maupun bekerjasama dengan masyarakat.

5. Pembangunan Pariwisata Desa

Dalam pengembangan desa wisata ini memang tidak bisa terlepas dari campur tangan masyarakat, oleh karena itu diharapkan dengan adanya program desa wisata ini dapat menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan dan tidak lagi sebagai obyek pembangunan. Masyarakat desa diberi ruang untuk berpartisipasi terhadap jalannya pengembangan desa wisata melalui organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa. Organisasi pengelolaan desa wisata antara lain sebagai berikut :

1. Pengelola desa wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
2. Organisasi pengelola desa wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota BPD.
3. Organisasi pengelola desa wisata merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
4. Organisasi pengelola desa wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
5. Jenis kegiatan desa wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi wisata desa setempat.
6. Pengaturan mengenai organisasi pengelola desa wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Melalui organisasi tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengembangan desa wisata. Pembangunan pariwisata

pedesaan juga diharapkan upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa, memperluas, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata, destinasi desa wisata, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa, akan semakin menyadarkan masyarakat desa membangun kemandirian dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pembangunan wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumberdaya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggungjawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Oleh karena itu peran Pemerintah Desa sangat penting terutama dalam meningkatkan serta mendukung pengelolaan dan pengembangan potensi desa yang dimiliki sehingga dapat mendorong jalannya pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peran tersebut didapatkan dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Hak Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata yaitu berhak mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan desa wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pemerintah Desa berkewajiban:

1. Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata,
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa,
3. Menegakkan peraturan perundang-undangan,
4. Menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa,
5. Menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa,
6. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata desa,
7. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
8. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemsayarakatan dalam bidang kepariwisataan desa,
9. Mengembangkan potensi SDA dan melestarikan lingkungan hidup, dan
10. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan desa.

Dari poin-poin di atas dapat dikatakan bahwa pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Oleh karena itu masyarakat desa diposisikan

sebagai sasaran sekaligus pelaku pembangunan desa, sedangkan pemerintahan desa berperan sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebab tanpa adanya kerjasama, kesatuan tujuan dan persepsi antar warga, serta warga bersama organisasi desa maupun institusi pemerintah desa maka dalam pengembangan desa wisata tidak akan pernah tercapai. Pada dasarnya Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak dan diharapkan mampu menjadi garda terdepan di dalam mensukseskan program pembangunan khususnya pengembangan desa wisata.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi dasar serta reverensi penulisan proposalpenelitian sebagai berikut :

1. Ristarnado Ristarnado. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Pariwisata. Hasil yang diperoleh yaitu strategi pemerintahan desa Tanjung Alam dalam pengembangan wisata Telaga Biru yaitu penyediaan sarana dan prasarana wisata telaga biru, rencana tambahan promosi, pembentukan pengurus tetap, koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pelaksanaan promosi pariwisata nusantara terutama di dalam negeri dan pelatihan pemandu wisata. Kendala yang dihadapi pemerintahan desa Tanjung Alam dalam pengembangan wisata Tanjung Alam adalah keterbatasan dana, rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) pengelola dan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin yang belum aktif dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana kegiatan wisata.

2. Ahmad Rochim. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul (Studi Pada Desa Wisata Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Hasil Yang diperoleh yaitu penelitian menunjukkan adanya peran pemerintah Desa Pujon Kidul sebagai animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, fasilitasi kelompok, serta peran dalam pemanfaatan sumber daya dan keterampilan. Adapun beberapa faktor pendukung Peran Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul adalah adanya pengelolaan sampah yang baik, akomodasi yang memadai, sistem komunikasi yang baik serta sistem keamanan yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah SDM yang masih rendah, akses jalan yang masih cukup sulit, motivasi penduduk yang masih rendah.Selain itu, tantangan yang dihadapi Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul adalah peningkatan jumlah desa wisata berkonsep wisata alam setiap tahun di Kabupaten Malang serta Perbedaan pendapatan di setiap Dusun di Desa Wisata Pujon Kidul yang masih rentan menimbulkan konflik sosial di masyarakat desa. Saran yang diberikan adalah adanya pengkajian lebih lanjut mengenai faktor penghambat dan tantangan yang lain dari sudut pandang yang berbeda serta juga diharapkan Pemerintah Desa dapat mengutamakan pengatasan masalah pada tantangan dan faktor penghambat yang telah ditemukan.
3. St. Soeraya. (2020). Straregi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Sebagai Desa Wisata Alam Di Desaleppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil Yang diperoleh yaitu (1) Strategi

pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata di Desa Leppangeng adalah strategi pengembangan, dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi desa pemerintah meningkatkan kapasiatas wisata. Memanfaatkan kekuatan dan peluang wisata Desa Leppangeng. Menghilangkan kelemahan dan memanfaatkan peluang yang dimiliki. Mengggunakan, dan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman dalam pengembangan wisata alam Desa Leppangeng. (2). Desa Leppangeng dalam melaksanakan strategi pengembangan, melakukan dengan meningkatkan status wisata, berkoordinasi dengan orang yang terkait dengan pmangku kepentingan dan dinas-dinas terkait pariwisata. Selain itu pemerintah desa juga melakukan pengembangan kapasitas dan sumber daya, dengan melakukan pelatihan, sosialisasi, dan membentuk kelompok sadar wisata untuk meningkatkan kemampuan masyarakt Desa Leppangeng. (3) Implemantasi strategi pengembangan lebih diarahkan kepada kelengkapan fasilitas umum, serta melakukan pelatihan kepada pengalolah wisata terkait menejeman pariwisata dan pendidikan kepada masyarakat terkait kesiapan menuju desa wisata alam.

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi merupakan hasil penelitian yang dapat relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian ini mengkaji dan meneliti tentang kebijakan pemerintah pemerintah desa dalam meningkatkan pariwisata, dimana penelitian terdahulu meneliti tentang strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pariwisata. Strategi yang dimaksud merupakan bagian dari kebijakan yang dibuat pemerintah desa untuk meningkatkan pariwisata.

C. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian dengan judul kebijakan pemerintah desa Tanah Kuning dalam meningkatkan pariwisata di desa Tanah Kuning dapat digambarkan sebagai berikut :

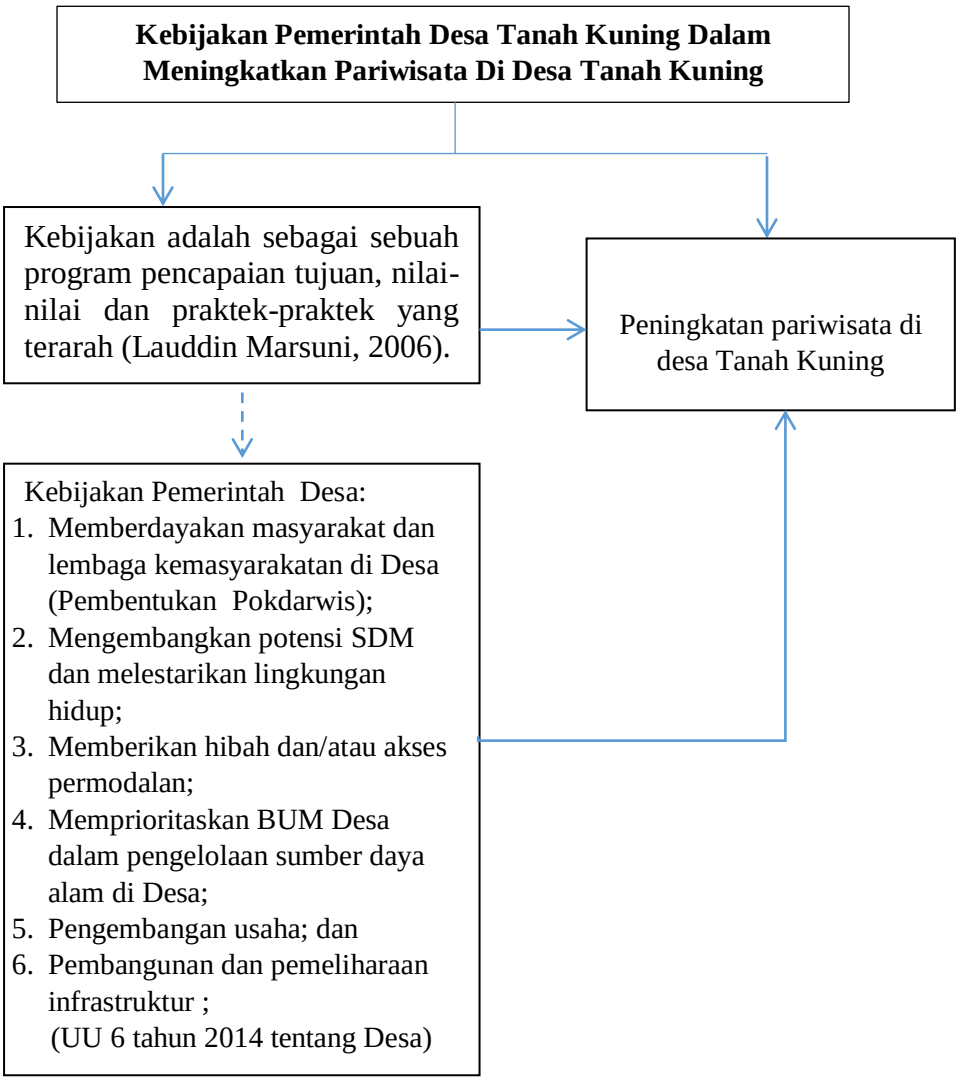

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian (2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Desa Tanah Kuning kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah pendudu kurang lebih 970 jiwa.

Berikut ini jadwal kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti dengan judul penelitian Kebijakan pemerintah desa Tanah Kuning dalam meningkatkan pariwisata di desa Tanah Kuning kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai brikut :

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan		Bulan					
		1	2	3	4	5	6	7
1	Pengajuan Judul	Agustus 2022						
2	Seminar Judul		Oktober 2022					
3	Seminar Proposal			November 2022				
4	Pelaksanaan Penelitian			November 2022	Desember 2022	Januari 2023		
5	Penyusunan Hasil Penelitian						Pebruari 2023	
6	Seminar hasil penelitian							Maret 2023

Sumber : Agenda Peneliti 2022

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Amirullah (2013:61), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk kata-kata dan tidak menggunakan angka-angka serta tidak menggunakan berbagai pengukuran. Menurut Sanjaya (2013: 47) metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pariwisata desa Tanah Kuning.

Penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri pokok. Ciri-ciri pokok dari metode deskriptif adalah: (1) memusatkan perhatian-perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual, dan (2) menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang adequat. Kegiatan penelitian yang akan diungkapkan dalam penelitian ini yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pamarintah desa tanah kuning dalam meningkatkan pariwisata.

C. Fakus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana

yang tidak relevan (Moleong, 2010). Adapun fokus penelitian yaitu kebijakan pemerintah desa Tanah Kuning dalam meningkatkan pariwisata di desa Tanah Kuning dengan indikator :

1. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa (Pembentukan Pokdarwis);
2. Mengembangkan potensi SDM dan melestarikan lingkungan hidup;
3. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
4. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa;
5. Pengembangan usaha; dan
6. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ;

D. Data dan Sumber Data

Menurut Arikunto (2006:129), sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Walaupun terdapat sejumlah klasifikasi data yang dilakukan oleh para ahli, namun secara umum data yang tersedia bagi seorang peneliti dapat dikelompokkan menjadi dua sumber yaitu, data primer dan data sekunder. Amirullah (2013:116) menyatakan bahwa, data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama Jonathan Sarwono (2012 : 8). Data tersebut merupakan data yang berasal dari responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Sumber data primer

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu terkait dengan peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Tanah Kuning.

Adapun sumber data primer atau informen yang ditentukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Kepala Desa Desa Tanah Kuning,
b. Sekertaris Desa Tanah Kuning,
c. Kepala Bagian Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan,
d. Kelompok Sadar Wisata Desa Desa Tanah Kuning,
e. Badan Usaha Milik Desa,
f. Tokoh masyarakat Desa Tanah Kuning sebanyak 5 orang,
g. Pemuda karang Taruna Desa Tanah Kuning

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018: 456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

Data sekunder yang dibutukan dalam penelitian ini mencakup peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk

teknis, program kerja pemerintah desa Tanah Kuning, kebijakan yang dibuat pemerintah desa Tanah kuning, data yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti berupa hasil studi literatur, penelitian terdahulu, dan dokumentasi terkait dengan topik yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2006: 222) bahwa, menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian, namun mengumpulkan data jauh lebih penting lagi terutama apabila peneliti menggunakan metode yang memiliki cukup besar celah untuk dimasuki unsur minat peneliti.

1. Observasi

   Amirullah (2013:123) menyatakan bahwa, dalam pengertian yang sederhana observasi meliputi kegiatan pencatatan pada perilaku orang, objek dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena yang diteliti. Sedangkan menurut Sanjaya (2013: 270), observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Metode observasi dapat dilakukan sebagai berikut.

   a) Observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam observasi terstruktur peneliti menetapkan secara rinci apa yang akan diobservasi dan bagaimana pengukuran akan dicatat, sedangkan observasi tidak terstruktur peneliti memonitor seluruh fenomena yang relevan tanpa penetapan rincian terlebih dahulu.

b) Observasi tersembunyi dan terang-terangan. Dalam observasi tersembunyi responden tidak sadar bahwa mereka sedang diamati, sedangkan observasi terang-terangan responden sengaja diberitahu bahwa mereka sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode observasi terang-terangan dimana peneliti memperlihatkan diri mereka agar nampak oleh responden yang akan diamati dan berterus terang kepada responden terhadap maksud dan tujuan untuk meneliti.

2. Wawancara

Menurut Sanjaya (2013:263), wawancara adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui saluraan media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data. Menurut Herdiansyah (2015:189), wawancara dalam penelitian kualitatif ataupun wawancara lainnya pada umumnya terdiri atas tiga bentuk, yaitu:

a) wawancara terstruktur, wawancara bentuk ini sangat terkesan seperti interogas karena sangat kaku, dan pertukaran informasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti sangat minim. Selama proses wawancara harus sesuai mungkin dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan,

b) wawancara semi terstruktur, merupakan wawancara yang relatif aman dan mudah digunakan terutama digunakan oleh peneliti pemula dengan metode kualitatif. Dengan wawancara semi terstruktur maka secara teoritis masih terikat dengan konsep teori yang digunakan, sementara dalam

menyusun pertanyaan, peneliti dibebaskan dalam melakukan eksplorasi namun tetap berkaitan dengan dimensi teori yang diteliti,

c) wawancara tidak terstruktur, merupakan wawancara yang tidak terikat dengan kerangka teoritis sehingga apa yang ditanyakan merupakan pertanyaan dengan tema besarnya saja dan pertanyaan yang diajukan dapat meluas dan membebaskan peneliti untuk bertanya apapun.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur karena karakteristik dari wawancara semi terstruktur sangat sesuai digunakan dalam penelitian kualitatif yang bersifat fleksibel, setting natural, dan menekankan pada kedalaman bahasa.

3. Dokumentasi

Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa, metode dokumentasi merupakan proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam metode ini yang diamati bukanlah benda hidup melainkan benda mati sehingga untuk menggunakan metode ini peneliti memegang chek-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Sedangkan Herdiansyah (2015:245) menyatakan bahwa, dokumentasi pada umumnya digunakan sebagai instrumen tambahan saja yang sifatnya memperkuat atau menambah reliabilitas dari instrumen utama yaitu obserevasi dan wawancara. Bentuk dokumentasi yang bisa digunakan oleh peneliti yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam bukunya Sugiono (2015 : 336) yang berjudul Metode Penelitian Pendidikan menyatakan bahwa "analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif atau penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan (interaktif), yaitu:sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

   Dalam pengumpulan data, peneliti akan dengan sendirinya terlibat melakukan perbandingan-perbandingan, apakah untuk memperkaya data bagi tujuan konseptualisasi, kategorisasi, ataukah teoritisasi. Tanpa secara aktif melakukan perbandingan dalam proses pengumpulan data tidak akan terjelajah dan terlacak secara induktif hingga ke tingkat memadai muatanmuatan yang tercakup dalam suatu konsep, kategori, atau teori.

2. Reduksi data

   Hasil pengumpulan data tersebut tentu saja perlu direduksi. Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kuantitatif. Menurut Herdiansyah (2015:264), inti dari reduksi data

adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

3. Penyajian Data

   Seperangkat reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat wujudnya secara lebih utuh. Hal ini diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikategorikan.

4. Penarikan Kesimpulan

   Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulannya menjuru kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut.

   Berikut gambar 3.1 Komponen Analisis Data :

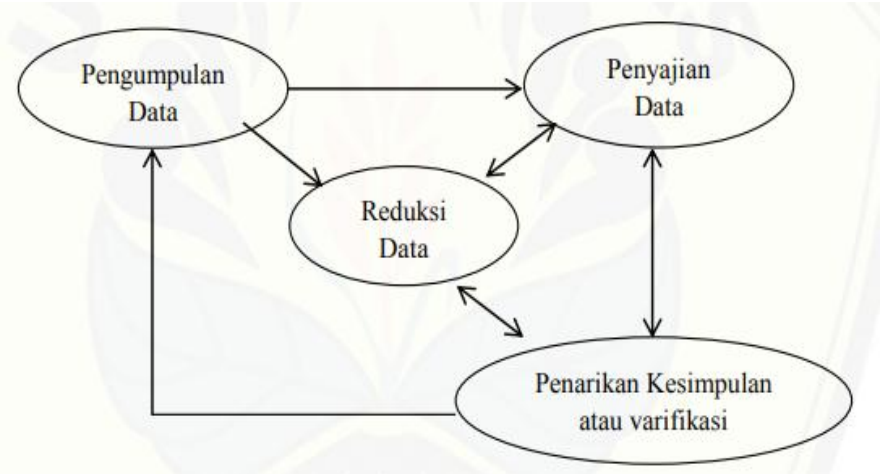

Sumber: Sugiono (2015) dalam Miles dan Huberman

G. Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data, maka peneliti menggunakan trianggulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembanding terhadap data itu.

Peneliti berusaha mengkaji data dengan mengkaji beberapa sumber dan mengadakan pengecekan hasil penelitian dengan para ahli ekonomi melalui buku-buku ekonomi Islam. Secara garis besar triangulasi ada 3 yaitu triangulasi sumber, tehnik, dan waktu. (Lexy J. Moleong. 2003: 330) :

1. Triangulasi sumber adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data, tehnik ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber.
2. Triangulasi tehnik adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan tehnik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rochim. 2018. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul (Studi Pada Desa Wisata Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Amin Priatna, Disertasi. 2008 "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia‖, Paca Sarjana UNJ.

Burhan Bungin. 2005.Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainya, Jakarta: Kencana.

Haroid Koontz Cyrill O'Donell, and Heinz Weihrich. 1992 Management Eighth Edition (New York : Mc Graw-Hill Book Company).

Heinz Weihrich and Haroid Koontz. 1993. Management A.Global Perspective Tent Edition (New York : Mc Graw-Hill, Inc.)

Ika Henny Husnul Khotimah. 2017. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Lexy J. Moleong. 2003. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Noeng Muhadjir. 2000. Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin.

Ristarnado Ristarnado. Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Pariwisata Vol 1, No 1, Juni 2019, pp. 40-51.

St. Soeraya. Straregi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Sebagai Desa Wisata Alam Di Desaleppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Volume VI No 2 Oktober 2020.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta